

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. SINERGITAS

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (Ahmad, 2023). Sehingga dalam bersinergi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Jika sinergi atau sinergitas tersebut diterapkan dalam organisasi kepada anggota sehingga bagaimanapun juga anggota tersebut dapat melakukan sinerginya bersama dengan anggota lain, maka sinergi atau sinergitas adalah faktor utama dalam organisasi. Namun di dalam suatu organisasi tidak adanya sinergi atau sinergitas dalam organisasi, maka akan menimbulkan pertikaian antar anggota yang dapat mengakibatkan sebuah tatanan kerja yang kurang efektif. Jika organisasi tersebut adanya sinergi antar anggota akan menjadikan produktivitas organisasi akan maksimal dan akan mencapai sebuah target yang sesuai dengan organisasi (Hanafi, 2022).

Sinergitas berkaitan dengan konsep dasar manajemen, sebab pada konsep dasar manajemen bersifat universal yang didefinisikan dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan, mencakup kaidah-kaidah dan

prinsip-prinsipnya. Apabila seorang manajer melalui sinergi nya dengan pengetahuan dasar-dasar manajemen dan cara cara menerapkannya (Iqbal Muan, 2023).

Sinergitas antar pegawai adalah hal penting untuk mencapai target di perusahaan. Tidak terdapat perbedaan dengan ilmu administrasi publik yang dianggap sebagai kerjasama yang dilakukan antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sinergitas yang memposisikan diri sebagai bagian dari katalisator yang terdapat di ilmu administrasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan dari sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu berkomunikasi dengan grup, melalui dialog dengan semua orang kelompok, pandangan, sikap, dan pendapat mereka mengenai kesuksesan (Linda Fitri, 2022). Sinergi juga saling melengkapi dan dilengkapi untuk mendapatkan sebuah tercapainya tujuan per bagian. Konsep kerja sama tersebut antara lain sebagai berikut (Nizam Maulana, 2020): 1) Berorientasi pada hal yang positif 2) Sebagai alternatif dari paradigma pelengkap 3) Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. 4) Mendapatkan hasil yang maksimal.

Indikator yang digunakan untuk menganalisis sinergi dalam penelitian ini adalah Doctoroff (1991), menyatakan bahwa syarat utama dari sistem sinergi yang ideal, termasuk indikator-indikator seperti komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.

1. Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi efektif bisa membentuk perubahan perilaku seseorang yang terlihat pada saat proses penyampaian. Tujuan komunikasi efektif sebenarnya untuk memudahkan informasi dari penyampaian secara lengkap antara pemberi informasi serta penerima informasi dengan bahasa yang jelas agar mudah di pahami

2. Umpan Balik Yang Cepat

Umpan balik yang cepat ialah jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dari penanya kepada narator. Hasil yang didapatkan berupa jawaban dari informasi yang diterima. Tentu dalam komunikasi bisnis pastilah adanya sebuah respon dari penerima informasi terkait elemen dalam penyampaian dari pendengar terhadap yang disampaikan pengirim dengan penyampaian yang jelas

3. Kepercayaan

Kepercayaan dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang terhadap sesuatu hal. Salah satunya untuk membentuk kepercayaan dalam perusahaan berarti tahapan untuk meyakinkan pada hal yang positif, membangun dari setiap langkah, serta komitmen. Jika

kepercayaan disalah artikan maka tidak akan menghasilkan sebuah kepercayaan dari seseorang.

4. Kreativitas

Kreativitas ialah naluri dari seseorang yang terus dikembangkan sehingga akan menimbulkan sebuah ide baru serta menemukan inovasi baru yang akan terus digali. Menurut Munandar menyampaikan bahwa terkait definisi dari kreativitas yakni sebuah kemampuan seseorang berdasarkan pola pikir yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan sehingga dapat menemukan inovasi baru. Dari penjelasan tersebut dijabarkan bahwa kreativitas ialah sebuah perilaku dari karakteristik seseorang yang dilakukan untuk melakukan suatu tindakan berupa inovasi baru dari hal yang di dapatkan

2.2. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Menurut Lukmanul Hakim, (2015:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang

mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral. Ini bisa bersifat paksaan atau bebas, dimanipulasi atau spontan. Partisipasi pada awalnya adalah definisi politik murni yang dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an. Selama tahun 1970-an, partisipasi mulai dikaitkan dengan tahapan administrasi dengan menambahkan latihan kerja dan proses pelaksanaan sehingga orang atau pertemuan dapat mencari situasi yang tidak dapat didamaikan dan bersaing untuk mendapatkan sedikit sumber daya.

Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengabaikan kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kemudian partisipasi mengajak orang lain untuk ikut andil dalam mendukung kehidupannya, nantinya menjadi bagian dari masyarakat akan berdampak pada kelangsungan hidup

kelompok dalam mencapai tujuan bersama, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Karena apa yang diberikan dilakukan dengan sukarela, ia membawa penyertaan penghargaan diri ke dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan keinginan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih layak dalam pelaksanaan kemajuan yang sinergis untuk manfaat jangka panjang dan dinikmati oleh secara keseluruhan (Dwi Rahayu, 2020).

Dalam beberapa pengertian dan penjabatan mengenai partisipasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum terdiri dari beberapa komponen, yaitu (Ahmad, 2020):

1. Individu yang hidup bersama
2. Dikumpulkan untuk jangka waktu yang lama karena hidup bersama mengembangkan sistem komunikasi dan standar yang mengawasi mereka
3. Mereka memahami bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Pada dasarnya masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat

dengan tempat. Unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu (Fauzi,2021):

1. Kelompok manusia
2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri
4. Adanya kesinambungan
5. Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya.

Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan. Masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu : Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Kedua Bercampur untuk waktu yang lama. Ketiga mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Terakhir keempat mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Lebih dalam, marhum (2021:141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia, Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis Kelamin, Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus

rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan, Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Pekerjaan dan Penghasilan, Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
5. Lamanya tinggal, Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sementara itu, Partisipasi masyarakat menurut Oakley (1991), umumnya partisipasi masyarakat merupakan proses aktif dimana penerima manfaat atau kelompok mempengaruhi arah dalam pelaksanaan proyek

pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam hal pendapatan, pertumbuhan pribadi, kemandirian, atau yang mereka hargai. Lebih lanjut, Oakley membagi tiga unsur penting dalam partisipasi, berupa:

1. Partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmani
2. Kesiapan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok
3. Unsur tanggungjawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa sense of belongingness.

Tidak hanya itu, Oakley turut membawakan sejumlah indikator dalam partisipasi masyarakat seperti kontribusi, pengorganisasian, peran masyarakat serta tanggungjawab. Menurut Oakley (1991:9), memberikan pemahaman tentang konsep partisipasi dengan mengelompokkan kedalam tiga pengertian pokok, yaitu partisipasi sebagai kontribusi; partisipasi sebagai organisasi; dan partisipasi sebagai pemberdayaan.

2.3. ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

Organisasi Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok yang dibentuk serta didirikan dengan rasa sukarela oleh masyarakat dalam rangka

ikut serta untuk membangun bangsa serta pencapaian atas tujuan NKRI yang didasari nilai-nilai Pancasila. Kelompok-kelompok tersebut didirikan dengan dasar aspirasi, keinginan, kebutuhan, minat, aktivitas, dan tujuan bersama. Ada beberapa tingkat masyarakat yang berbeda di mana kelompok massa hadir. Organisasi-organisasi sosial mulai ada pada saat yang sama dengan munculnya organisasi-organisasi masyarakat sipil. Peran utama ormas adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi guna mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, organisasi yang terorganisir secara struktural yang biasanya tersusun secara sistematis dalam beragam tingkatan dan dikenal dengan istilah organisasi kemasyarakatan (ormas). Alat, bagian, anggota, atau badan inilah yang dilambangkan dengan istilah Latin "organum" (organum), dan dari sinilah kata Yunani "organon" berasal (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022). Menurut James D dalam (Ramadhan et al., 2022), organisasi didefinisikan sebagai wadah bagi sekelompok manusia sebagai jalan untuk menggapai tujuan bersama.

Muhammadiyah merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan yang mempunyai landasan Islam di Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1912, di Yogyakarta, seorang pendeta bernama K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Cendekiawan Islam Dahlan dipengaruhi oleh gerakan reformis dan memiliki misi untuk mengembalikan Islam yang otentik dan memberantas kegiatan yang dianggap sesat. Meski demikian, belakangan ini Muhammadiyah mulai melakukan inovasi dengan

terus berupaya memajukan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti meneladani perbuatan baik dan mengajarkan amal shaleh. Muhammadiyah juga dikenal dengan sejumlah nama lain, antara lain Islam Progresif, Islam Modernis, Islam Moderat, dan Islam Murni (Zarro, 2020).

Muhammadiyah baru mulai menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan kemajuan masyarakat modern melalui inisiatif-inisiatif termasuk inisiatif pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan ekonomi serta kesehatan dan pendidikan. inisiatif seperti pembangunan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, inisiatif pendidikan, dan program kesehatan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan kemajuan modern (Zarro, 2020). Muhammadiyah telah sukses di bidang pendidikan dengan memadukan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi kontemporer di ruang kelas yang mengintegrasikan pengajaran formal dan agama. Misalnya saja melalui program Kuliah Ahad Subuh (KAS) yang dilaksanakan secara luring dan daring, Universitas Muhammadiyah Malang berhasil memberikan fasilitas yang cukup untuk menunjang proses belajar mahasiswa dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersamaan dengan memperoleh pengetahuan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kelompok Masyarakat Menjadi Undang-Undang mengatur tentang kelompok masyarakat di Indonesia. Organisasi kemasyarakatan yang disebut juga Ormas adalah kelompok yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dalam rangka ikut serta dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kelompok-kelompok ini didasarkan pada kebutuhan, minat, aspirasi, dan kegiatan bersama.

Secara umum menurut (Sulthan Alfaraby & Syafrina Sari Lubis, 2022) organisasi kemasyarakatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

5. Organisasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat.
6. Sebagai senjata untuk membela dan mendukung lapisan masyarakat tertentu.
7. Sebagai wadah atau wadah dimana individu dapat menyuarakan pendapatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Program kegiatan organisasi mungkin mempunyai arah politik, meskipun kegiatan itu sendiri tidak bersifat politis.

Organisasi kemasyarakatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori, berupa:

1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang tertentu disebut juga organisasi profesi.

2. Kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Persis, LDII, dan lain-lain yang melakukan beberapa spesialisasi kegiatan kemasyarakatan. Ketika kelompok agama benar-benar bekerja di sektor sosial lain termasuk kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Ormas, tujuan, tugas, dan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
2. Menawarkan layanan masyarakat.
3. Pegang teguh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan prinsip agama.
4. Melestarikan dan menjunjung tinggi standar, nilai, moralitas, etika, dan budaya masyarakat.
5. Melindungi lingkungan dan sumber daya alam.
6. Menumbuhkan toleransi, kolaborasi, dan solidaritas sosial dalam pergaulan sehari-hari.
7. Melestarikan dan memperkuat kekuatan dan kekompakan negara.
8. Tercapainya tujuan negara.

Peran kelompok masyarakat yang dituntut untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat dijelaskan oleh teori organisasi masyarakat. Kelompok masyarakat dilarang melakukan kegiatan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau menimbulkan kerusakan infrastruktur sosial dan publik.

2.4. CIVIL SOCIETY

Civil society memiliki definisi konsep yang beragam pada tokoh/orang yang mengartikannya. Istilah yang sering digunakan seperti Koinonia Politike (Aristoteles), Societas Civilis (Cicero), Comonitas Politica, dan Societe Civile (Tocquivile), Civitas Etat (Adam Ferguson). Hal ini terjadi karena konsep civil society memiliki banyak versi dan pemahaman, dan juga merupakan sebuah wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Suwarni (2011) menyampaikan bahwa Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto,2018) Civil society memberikan penekanan pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Pada ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, mengurangi terjadinya konflik, mengatasi masalah perekonomian serta masalah sosial, dimana peranan yang dilakukan tersebut

sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni makmur, adil dan berdaulat. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa civil society berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara

Civil society dalam tata kelola pemerintahan mempunyai fungsi dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan dan akuntabilitas. Pemerintahan yang demokratis pada dasarnya mampu menciptakan sebuah ruang berinteraksi dan berorganisasi untuk setiap individu secara bebas dimana nantinya akan menjadikan masyarakat sipil tersebut menjadi sebuah organisasi atau gerakan (Muradi, 2016). Keberadaan organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (public sphere) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut Afan Gaffar, yang paling banyak diharapkan memainkan peranan penting dalam mengisi ruang publik dalam civil society di Indonesia adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lainnya.

2.5. DEMOKRATISASI

Hertz dalam (Rahman, 2021) berpendapat bahwasanya *“Democracy is a type of governance in which no single person has political power over another. Government is thus the control of all over all in the common, rather than in the individual or distinct group interests”* (Demokrasi adalah suatu bentuk

pemerintahan di mana tidak ada satu anggota pun yang mempunyai hak prerogatif politik atas anggota lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan adalah kekuasaan semua orang untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu).

Pertumbuhan akhir demokrasi sangatlah luas karena konsep tersebut sudah ada sejak abad kelima SM, awalnya sebagai respon terhadap pengalaman negatif dari sistem kerajaan dan pemimpin yang otoriter serta kejam di negara-negara kota Yunani. Ada indikasi setelah PD II, untuk pertama kalinya konsepsi dasar demokrasi menjadi landasan formal bagi sebagian besar negara di seluruh dunia (Samir, 2021).

Bagi mereka yang menjalankan demokrasi, hal ini mempunyai arti penting karena memberikan mereka kekuasaan untuk memilih bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan dijalankan. Oleh karena itu, walaupun konsekuensi praktisnya berbeda-beda di setiap negara, hampir semua penafsiran istilah “demokrasi” selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Karena demokrasi adalah landasan kehidupan bernegara, maka pilihan terhadap hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada hakikatnya ada pada masyarakat, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena pada akhirnya menentukan kehidupan masyarakat (Samir, 2021). Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, maka negara demokratis adalah negara yang disusun berdasarkan pilihan dan kemauan rakyat. Atau dengan kata lain, dari sudut pandang organisasi, adalah negara yang dibentuk oleh rakyat atau atas persetujuan mereka.

Hendry B. Mayo dalam (Noya, 2022) memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut. *“A democratic political system is one in which representatives are subject to effective popular oversight and public policies are established by a majority vote in regular elections held under circumstances of political freedom and political equality”*

Beragam perspektif mengenai topik demokrasi ditawarkan oleh para intelektual di Indonesia. Demokrasi dianut oleh sebagian orang dan ditolak oleh sebagian lainnya. Pihak yang menentang demokrasi adalah Jalaluddin Rakhmad. Ia mengklaim bahwa demokrasi adalah sistem politik sekuler di mana rakyat memiliki kedaulatan, namun syariat tidak dapat diubah dengan suara mayoritas dalam demokrasi. Pada kenyataannya, ancaman mempunyai kekuatan untuk mengontrol suara rakyat, yang mewakili demokrasi (Ramadhanil, 2020). Mengenai mereka yang menganut demokrasi. Amin Rais ada di antara mereka. Amin Rais menganut demokrasi karena alasan berikut: pertama, demokrasi didasarkan pada premis bahwa umat Islam harus berkonsultasi satu sama lain ketika menyelesaikan suatu masalah, yang diamanatkan oleh Al-Quran. Kedua, umat Islam secara intelektual diinstruksikan untuk menggunakan teknik pemecahan masalah yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi selalu menjadi jenis struktur pemerintahan terbaik sepanjang sejarah umat manusia.

Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang mempunyai kekuatan untuk mengubah kehidupan masyarakat dalam demokrasi. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk mengambil

bagian dalam perancangan, pengembangan, dan pemberlakuan undang-undang baik secara langsung atau melalui perwakilan. Kebebasan politik yang setara dipraktikkan dalam kerangka sosial, ekonomi, dan budaya yang demokratis. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertimbangkan cita-cita demokrasi dan syarat-syarat yang diperlukan bagi terciptanya negara demokrasi. Berikut ini adalah cita-cita demokrasi (Mintawati, 2021):

1. Kedaulatan Rakyat

Gagasan kedaulatan rakyat menyoroti bahwa rakyat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang atau satu individu, mempunyai otoritas tertinggi untuk membuat pilihan. Landasan seluruh prosedur pengambilan kebijakan publik yang melibatkan kepentingan rakyat haruslah kedaulatan tersebut. Struktur politik pemerintahan mempunyai otoritas tertinggi atas semua pilihan politik yang dibuat di negara berdaulat mana pun.

2. Kesamaan Politik

Menjamin kesetaraan politik mengharuskan semua warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Gagasan kedaulatan rakyat secara logis mengarah pada konsep kesetaraan politik. Jika ada perbedaan di antara mereka, seperti keistimewaan atau perlakuan khusus yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, maka kedaulatan rakyat terpecah

menjadi beberapa bagian yang tidak lagi mewakili kedaulatan seluruh rakyat atau demokrasi.

3. Kekuasaan Mayoritas

Pemerintah harus mengambil bagian dalam melaksanakan kebijakan publik yang disepakati secara universal oleh rakyat dalam pemerintahan demokratis sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat. Menurut prinsip suara mayoritas, suatu kebijakan publik harus disetujui atau ditolak berdasarkan suara terbanyak yang setuju atau tidak setuju. Gagasan ini tidak berarti bahwa rakyat harus selalu diajak berkonsultasi atau mayoritas harus menyetujui setiap langkah pemerintah.

4. Konsultasi Rakyat

Ada dua bagian dalam prinsip ini: pertama, negara harus menciptakan struktur kelembagaan yang memungkinkan pejabatnya meneliti dan memahami kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pilihan masyarakat harus diketahui oleh negara. Kedua klausul ini secara alamiah berasal dari kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Proses menjadi lebih demokratis merupakan salah satu komponen upaya masyarakat untuk mempengaruhi sistem politik. Tentu saja, masyarakat sangat membutuhkan apa yang dilakukan pemerintah, dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberhasilan demokratisasi dipengaruhi oleh sejumlah

elemen, antara lain keamanan, stabilitas, dan pendidikan. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari indeks demokrasi masing-masing negara yang diperbarui setiap tahunnya.

Masyarakat sipil atau masyarakat umum harus melakukan intervensi untuk menumbuhkan keadaan demokratis. Di negara-negara yang sedang melakukan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis atau sedang berupaya menuju kondisi demokrasi yang lebih baik, masyarakat sipil sangatlah penting. Walzer (1997) dalam (Mintawati, 2021) berpendapat *“A democratic state is the only entity that has the ability to establish and maintain a democratic civil society”*. Lebih lanjut Tocqueville dalam (Mintawati, 2021) berpendapat *“Civil society, also known as the "third" or "non-profit" sector, encompasses all networks and associations between the state and the family that involve "voluntary" membership and activities. These include officially registered non-governmental organizations (NGOs) of various kinds, labor unions, political parties, churches and other religious organizations, professional and business associations, community and self-help groups, social movements, and independent media“*

Karena demokrasi dianggap mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat serta menjadi wadah perjanjian nasional yang mengikat secara hukum dan wajib dijunjung dan dihormati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka prinsip-prinsip demokrasi menjadi penting untuk diterapkan di sana.

2.6. PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi sejumlah ide dan konsep yang dapat dikonsultasikan ketika membahas metode perdebatan temuan penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab ini akan membahas ide dan konsep yang digunakan serta tinjauan literatur dari konten yang dipelajari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan jurnal atau artikel sebelumnya yang membahas secara tepat peran pengawasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat dalam demokrasi..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Wafa, 2021) menyatakan percaya bahwa LSM mempunyai peran besar dalam pertumbuhan suatu negara. Untuk melaksanakan beberapa perubahan sosial, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum, negara memerlukan keterlibatan masyarakat. Selain itu, proses demokrasi juga mencakup persyaratan bahwa pemerintah beroperasi berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin bahwa proses pembangunan dilaksanakan secara kompeten dan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat darinya. Dengan demikian, komponen masyarakat berkontribusi dalam terciptanya pemerintahan yang menyoal terpenuhinya kepentingan publik melalui perencanaan pembangunan, baik melalui sistem pengawasan resmi maupun informal, serta melalui kemitraan kolaboratif dengan pemerintah. Pemerintah dan kelompok sipil memperkuat pola kemitraan mereka untuk mendorong pembangunan. Hal ini menggambarkan berlanjutnya bentuk pemerintahan demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat (Nora et al., 2023).

Suatu bangsa dapat menjadi lebih demokratis melalui kontrol masyarakat, yang dapat dilakukan melalui pengaduan, kelompok massa, atau pemerintah sendiri. Pengaduan masyarakat terhadap kelompok massa dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Tergantung pada status dan lokasi ormas, pengaduan dapat dikirim ke menteri, gubernur, walikota, atau bupati. Sedangkan pengawasan eksternal pemerintah terhadap kelompok massa dilakukan sesuai dengan derajat pemerintahan oleh menteri, gubernur, bupati, dan walikota. (C. Wibowo & Harefa, 2015) berpendapat bahwasanya Untuk mencegah terjadinya kegiatan anarkis dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat (ormas).

Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemantauan organisasi massa merupakan salah satu persyaratan operasional yang diperlukan. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 53 hingga Pasal 56 UU Ormas, substansi peraturan pemerintah mengenai pengawasan ormas harus mengatur berbagai bidang pengawasan ormas secara lebih operasional. Wujud dari implementasi kontrol terhadap pergerakan ormas di Indonesia ditunjukkan oleh (Yasti Efyanti, 2021) yang menyatakan bahwa Badan Pembangunan Nasional Kota Cimahi telah membina tanggung jawab dan fungsi rukun warga sekaligus melaksanakan kewajibannya secara sistematis. Elemen kunci dalam pengembangan dan pengelolaan kelompok massa di Kota Cimahi adalah komunikasi dan strategi yang dilakukan Badan Kesbang. Pembagian tugas setiap pegawai Badan Pembangunan Nasional pada ranah ormas dan LSM telah berjalan dengan baik. Keberhasilan Badan Pengembangan Masyarakat Kota Cimahi dalam menjalankan fungsinya

mengarahkan dan mengawasi organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Cimahi terlihat dari rendahnya angka pelanggaran yang dilakukan kelompok tersebut

Meskipun ada kemajuan baru dalam teks kebijakan di tingkat nasional, kontrol terhadap kelompok massa yang terarah dan terdiferensiasi akan terus berlanjut, berdasarkan pembelajaran dari Kesbang Cimahi. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa perkembangan terkini dalam kebijakan koperasi akan mengarah pada pembentukan organisasi massa yang mengakar. Ketika teknik-teknik tradisional dan saluran-saluran administratif digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kooperatif, maka hal-hal tersebut akan segera menjadi sarana baru untuk mengendalikan kelompok-kelompok massa. (Yuliarmi et al., 2018).

Berikutnya, kondisi pemantauan kelompok masyarakat di Indonesia akan dikontraskan dengan pemantauan organisasi masyarakat di negara lain, misalnya Tiongkok. (Chan, 2022) mengatakan bahwa sepanjang 20 tahun sebelumnya, pemerintah Tiongkok telah berhasil membatasi pertumbuhan kelompok massa. Berbagai departemen pemerintah terlibat dengan OMS dalam skala pemantauan dan intervensi yang progresif dengan mengevaluasi jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dari mana mereka mendapatkan pendanaan, dan sejauh mana jangkauan mereka. LSM menegosiasikan otonomi dengan organisasi pengawas pemerintah dan terkadang secara aktif menentang pelecehan yang dilakukan oleh agen keamanan publik atau keamanan negara sebagai respons terhadap pemantauan. Respons dan penolakan seperti ini memacu negara untuk mengambil tindakan

lebih lanjut, sehingga mengubah keseluruhan proses pengendalian dan pengelolaan.

Selain itu, jika meninjau pernyataan (Yuanni, 2021) maka akan ditemukan hasil riset bahwasanya Menurut teori pemerintahan kontemporer, model penyelesaian masalah publik Tiongkok idealnya menggabungkan upaya pemerintah, masyarakat, dan warga negara dalam saling mendukung dan berkolaborasi. Hal ini terlihat dari ciri-ciri organisasi pemerintah serta fungsi dan kelebihan yang menjadikan organisasi massa sebagai sumber daya sosial yang sangat penting dalam penanganan krisis publik. Krisis publik dapat diatasi secara efisien jika pemerintah dan kelompok masyarakat bekerja sama, saling mendukung, dan mengintegrasikan serta menggunakan sumber daya sosial secara penuh. Oleh karena itu, pembentukan dan pengaturan organisasi massa serta perluasan saluran dan metode yang memungkinkan organisasi massa terlibat dalam manajemen krisis publik merupakan hal yang penting dalam proses menciptakan masyarakat yang damai.

Dibalik pernyataan yang diutarakan sebelumnya mengenai organisasi masyarakat di Cina, (Yuliarmi et al., 2018) menyatakan bahwasanya Organisasi massa di Tiongkok menghadapi tantangan dan kendala terkait pemasaran jasa, ketergantungan finansial, dan otonomi. Pertama, organisasi massa terkena dampak penerapan prinsip pasar melalui subsidi silang, birokratisasi dan spesialisasi, skala ekonomi (yang menguntungkan LSM yang lebih besar dan bereputasi), dan berkurangnya tekanan terhadap kondisi kerja. Kedua, sistem kontrak yang berkembang akibat berkurangnya sumber pendanaan alternatif, memaksa

kelompok masyarakat untuk lebih bergantung pada uang pemerintah. Ironisnya, karena dukungan pemerintah terbatas, tidak dapat diandalkan, dan tidak aman, hal ini mengancam kelangsungan hidup kelompok massa dalam jangka panjang. Ketiga, kontrak menerapkan standar kinerja, manajemen, dan akuntabilitas yang ketat yang umumnya berlaku pada sektor korporasi, sehingga menghalangi organisasi besar untuk mencapai tujuan mereka dan melemahkan advokasi serta organisasi berbasis hak asasi manusia.

Lapisan kedua, kelompok massa di Tiongkok menunjukkan keberagaman dalam interaksi mereka dengan pemerintah Tiongkok, sementara kekuatan pemerintah Tiongkok telah memengaruhi perilaku mereka (Wang, 2023). Meskipun lapisan sekunder lebih banyak dipengaruhi oleh pemerintah, lapisan utama menyoroti kekuatan struktural dari pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam hal konsepsi, pendanaan, dan pelaksanaan proyek mereka, sebagian besar LSM di Tiongkok tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Selain itu, korporatisme dapat mengevaluasi situasi dan mengubah strateginya sesuai dengan perkembangan status masing-masing ormas dalam upaya menciptakan dan meningkatkan mekanisme interaksi antara pemerintah dan ormas. Hal ini memungkinkan pemerintah berhasil menghindari konsekuensi memalukan dari konflik kepentingan yang intens antara pemerintah dan organisasi massa (Zhu, 2022).

Kelompok massa di Tiongkok sangat mirip dengan kelompok massa di Indonesia karena keduanya dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah dan dapat dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mengakomodasi

kepentingan politik yang masih ada (Wang, 2023). Sebaliknya di Indonesia, negara melalui pegawai hanya diperbolehkan menerima dan menyumbangkan dana kepada Partai Politik sebagaimana pedoman yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

